

# LAPORAN KINERJA


## INSPEKTORAT

**TAHUN 2024**

**NOMOR: 010.1/AI.08/LAP/H/2025**

**Hubungi kami:**

 [inspektorat.bkn@gmail.com](mailto:inspektorat.bkn@gmail.com)

 [inspektorat.bkn.go.id](https://inspektorat.bkn.go.id)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB. I. PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Gambaran Organisasi .....	1
1.3. Isu Strategis .....	4
 <b>BAB. II. PERENCANAAN KERJA .....</b>	 <b>5</b>
2.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara .....	5
2.2. Tujuan Strategis Organisasi .....	5
2.3. Sasaran Strategis .....	6
2.4. Perjanjian Kinerja 2024 .....	7
 <b>BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	 <b>9</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	9
3.2. Analisis Kinerja .....	11
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima .....	11
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama .....	19
Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel .....	25
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang Kompeten .....	41
Sasaran Strategis 5: Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Sestama BKN yang handal dan mudah diakses .....	44
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima .....	46
Sasaran Strategis 7: Terkelolanya anggaran di lingkup Sestama BKN secara efisien dan akuntabel .....	52
3.3. Capaian Anggaran .....	54
 <b>BAB. IV. PENUTUP .....</b>	 <b>56</b>
4.1. Kesimpulan .....	56
4.2. Rekomendasi/Masukan .....	57
 <b>LAMPIRAN .....</b>	 <b>58</b>

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024 adalah suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Inspektorat BKN. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, kendala dalam pencapaian target kinerja serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BKN Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai kinerja Inspektorat pada tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Inspektorat kedepannya.

Jakarta, 10 Januari 2025  
Inspektur,

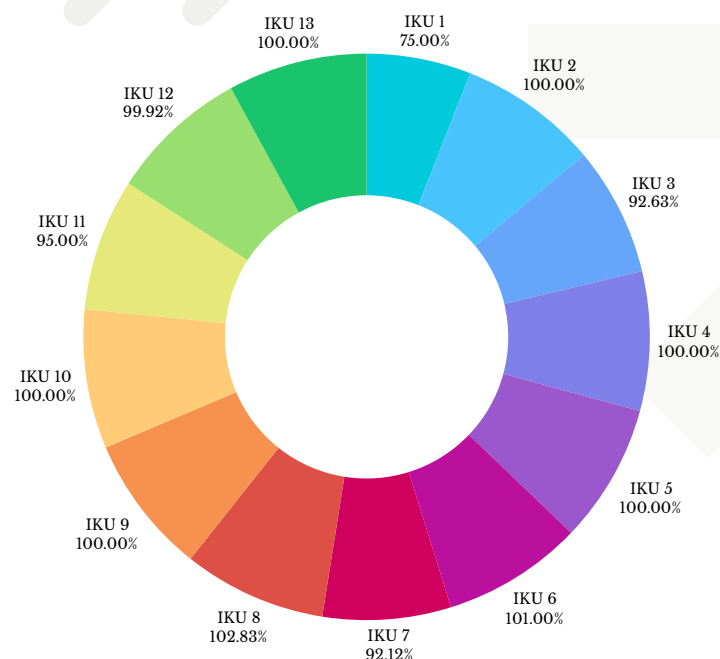
±

# Ringkasan Eksekutif



**S**esuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020, tugas pokok dan fungsi inspektorat adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Inspektorat pada tahun 2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai berdasarkan Rencana Kinerja Inspektorat BKN Tahun 2024.

Grafik. 1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024



Berdasarkan grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024 di atas, IKU yang capaiannya di atas 100% adalah IKU 6 (100,00%) dan IKU.8 (102.83%). IKU yang capaiannya 100% yaitu IKU.2, IKU.4, IKU.5, IKU.9, IKU.10, dan IKU 13. Terdapat satu IKU dengan kategori cukup yaitu IKU.1. Sedangkan sisanya yaitu IKU.3, IKU.7, IKU.11, dan IKU.12 mendapatkan kategori “Baik” dengan rentang penilaian diantara 80-100%.

Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Inspektorat tahun 2024 yaitu 95.18% yang diperoleh dari total penjumlahan Nilai Kinerja Perspektif.

Nilai maturitas SPIP BKN tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator BPKP berada pada level 3 dengan skor 3,520 dan tingkat maturitas “Terdefinisi”.

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat cetakan ke-9 tanggal 29 November 2024 bahwa pagu Inspektorat adalah sebesar Rp1.017.500.000 (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentase 99,92% sebesar Rp 1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) atau pada persentase 0.08%.

Dari total pagu anggaran yang terserap, Inspektorat telah melaksanakan 68 (enam puluh delapan) kegiatan dengan rincian 5 (lima) kegiatan pre audit, 11 (sebelas) kegiatan audit, 10 (sepuluh) kegiatan Reviu, 21 (dua puluh satu) kegiatan evaluasi, serta 21 (dua puluh satu) kegiatan pengawasan lainnya.

Secara umum, tugas pokok Inspektorat telah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan Inspektorat BKN dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.2. Tugas, Fungsi, dan Gambaran Organisasi**

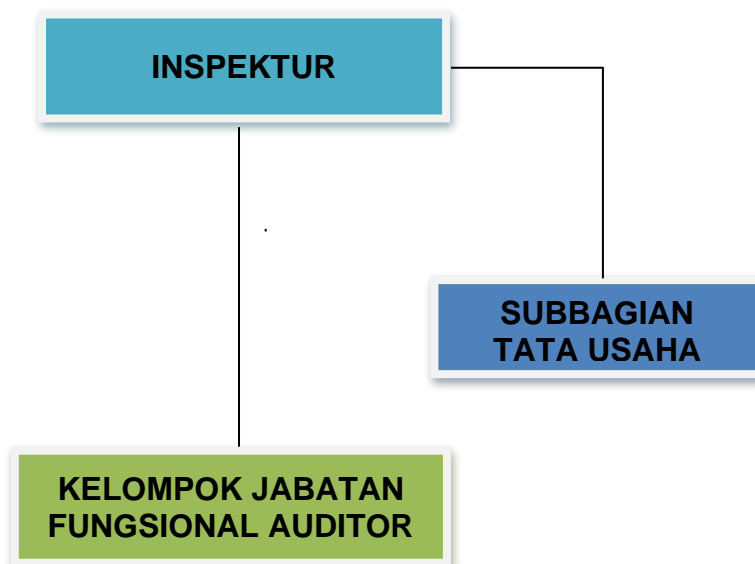
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, di lingkungan BKN dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, serta dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN. Untuk menjalankan tugas tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Gambar. 1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat BKN**



**Tabel. 1**  
**Kondisi Sumber Daya di Inspektorat Tahun 2024**

Jabatan	Kondisi saat ini
Inspektur	1
Kepala Subbagian Tata Usaha	1
Auditor Madya	6
Auditor Muda	5

Jabatan	Kondisi saat ini
Auditor Pertama	16
Auditor Penyelia	1
Auditor Mahir	3
Auditor Terampil	5
Arsiparis Terampil	1
Analisis Kinerja	1
Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1
PPNPN	1
<b>J U M L A H</b>	<b>42</b>

Hingga akhir tahun 2024 Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 42 (empat puluh dua) pegawai dengan komposisi seperti pada tabel di atas. Saat ini pegawai dengan jabatan Auditor Pertama menempati komposisi terbesar dengan jumlah 16 orang atau 38% dari total pegawai.

**Tabel. 2**  
**Kompetensi ASN Inspektorat berdasarkan tingkat Pendidikan Formal**

Strata	Jurusan	Jumlah	Persentase
S2	Magister Manajemen	2	4,76 %
S2	Magister Sains	2	4,76 %
S2	Magister Sains Ekonomi	1	2,38 %
S2	Magister Administrasi Bisnis	2	4,76 %
S2	Magister Administrasi Publik	1	2,38 %
S1	Ekonomi	12	28,57 %
S1	Psikologi	3	7,14%
S1	Ilmu Komputer	1	2,38 %
S1	Ilmu Komunikasi	1	2,38 %
S1	Akuntansi	3	7,14 %
S1	Pendidikan Akuntansi	1	2,38 %



Strata	Jurusan	Jumlah	Persentase
S1	Teknik	2	4,76 %
S1	Administrasi Bisnis	1	2,38 %
D3	Akuntansi	9	21,42 %
D3	Ahli Gizi	1	2,38 %
<b>J U M L A H</b>		<b>42</b>	<b>100 %</b>

Hingga akhir tahun 2024 Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi Pendidikan terbanyak S1 Ekonomi sebanyak 12 orang seperti pada tabel di atas.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin per Desember 2024 di Lingkungan Inspektorat mayoritas wanita sebanyak 28 orang (66,6%) dan pria sebanyak 14 orang atau 33,3% dari jumlah pegawai.

### 1.3. Isu Strategis

Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menghadapi beberapa isu strategis diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas dan Kinerja Inspektorat BKN belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi;
2. Kapabilitas dan Profesionalisme ASN Inspektorat BKN belum mencapai level yang diharapkan pimpinan;
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern belum optimal;
4. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang belum terpenuhi sesuai dengan target pada Peta Jabatan;

Dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada, maka disusunlah 7 Sasaran Strategis dengan 13 Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat untuk capaian tahun 2024.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Inspektorat merupakan turunan dari Rencana Strategis yang ada di BKN dengan menetapkan visi dan misi yang selaras dengan tujuan organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta melihat latar belakang dan mencermati kondisi yang ada, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat berpedoman pada visi BKN, yaitu: "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Dengan melihat visi tersebut di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap pegawai di lingkungan Inspektorat sebagai langkah nyata dari tujuan organisasi,

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Aspek peningkatan akuntabilitas merupakan upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah, melalui peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan intern.

#### **2.2. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis Inspektorat merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi BKN yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka

Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki dan dapat mengukur sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai. Adapun tujuan strategis Inspektorat ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas atas laporan keuangan BKN;
2. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKN;
3. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKN;
4. Meningkatnya kapabilitas APIP BKN;
5. Mendorong terbangunnya Zona Integritas unit kerja menuju WBK/WBBM;

### **2.3. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis yang terukur sehingga dapat dicapai keberhasilannya, adapun Sasaran Strategis Inspektorat adalah:

1. Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel;
4. Terwujudnya ASN di Lingkup Sestama BKN yang kompeten;
5. Tersedianya sistem informasi ASN di Lingkup Sestama BKN yang handal dan mudah diakses;
6. Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
7. Terkelolanya anggaran di lingkup Sestama secara efisien dan akuntabel.

## 2.4. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun target kegiatan, yang merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

**Tabel. 3**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024**

Kode SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Customer Perspectives				
SS.1.	Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	IKU.1	Level Maturitas SPIP	4
		IKU.2	Level Kapabilitas APIP	3
SS.2	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama	IKU.3	Indeks kepuasan unit pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	94
Internal Process Perspectives				
SS.3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU.4	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di Lingkungan BKN	1
		IKU.5	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	100%
		IKU.6	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100%
		IKU.7	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	100%
Learning and Growth Perspectives				
SS.4	Terwujudnya ASN di Lingkup Settama BKN yang Kompeten	IKU.8	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	81

Kode SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
SS.5	Tersedianya sistem Informasi ASN di Lingkup Sestama BKN yang Handal dan Mudah di Akses	IKU.9	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat	100%
SS.6	Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	IKU.10	Persentase Pelaksanaan Reformasi Aksi Birokrasi Inspektorat	100%
		IKU.11	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Inspektorat BKN	75
SS.7	Terkelolanya anggaran di Lingkup Sestama secara efisien dan akuntabel	IKU.12	Persentase realisasi anggaran di Inpektorat	100%
		IKU.13	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/ Inspektorat	100%

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024, Inspektorat didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.017.500.000** (satu milyar tujuh belas juta lima ratus rupiah) sesuai dengan [Petunjuk Operasional Kegiatan \(POK\) Inspektorat cetakan ke-9](#) tanggal 29 November 2024.

## **BAB. IIII**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diukur dengan pendekatan konsep *Balance Scorecard* (BSC) yaitu *stakeholder, customer, internal process* dan *learn and growth* yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1.8/KEP/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

**Tabel. 4**  
***Balance Scorecard (BSC)***

Keterangan		Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	Lebih dari 100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	Kurang dari 49	Merah
5	Belum ada Skor		Putih

NKP: NILAI KINERJA PERSPEKTIF

NSS: NILAI SASARAN STRATEGIS

NPSS: NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

**Tabel. 5**  
**Realisasi IKU Inspektorat Tahun 2024**

Capaian Kinerja Tahunan

Pilih Unit :  
Inspektorat

Pilih Periode :  
2024Tahunan

Lihat

NPSS : 95.18

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Satuan	Tahunan		Presentase Realisasi
			Target	Realisasi	
Stakeholder Perspective		Skor SS:	N/A	NKP:	N/A
Customer Perspective		Skor SS:	90.06	NKP:	29.72
SS1	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	NSS:	87.50		
IKU1	Level Maturitas SPIP	Level	4	3.00	75%
IKU2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3.00	100%
SS2	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama.	NSS:	92.63		
IKU3	Indeks kepuasan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.	Indeks	94	87.07	92.63%
Internal Process Perspective		Skor SS:	98.28	NKP:	32.43
SS3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel.	NSS:	98.28		
IKU4	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	Pedoman	1	1.00	100%
IKU5	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100.00	100%
IKU6	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	Persentase	100	101.00	101%
IKU7	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	Persentase	100	92.12	92.12%
Learning & Growth Perspective		Skor SS:	100.07	NKP:	33.02
SS4	Terwujudnya ASN di lingkup Sestama BKN yang kompeten.	NSS:	102.83		
IKU8	Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Inspektorat	Nilai	81	83.29	102.83%
SS5	Tersedianya sistem informasi ASN di lingkup Sestama BKN yang handal dan mudah diakses.	NSS:	100.00		
IKU9	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN.	Persentase	100	100.00	100%
SS6	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	NSS:	97.50		
IKU10	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat	Persentase	100	100.00	100%
IKU11	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat BKN	Nilai	75	71.25	95%

SS7	Terkelolanya anggaran di lingkup Sestama BKN secara efisien dan akuntabel.	NSS:	99.96		
IKU12	Persentase realisasi anggaran di Inspektorat	Persentase	100	99.92	99.92%
IKU13	Persentase pelaksanaan tindak lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	Persentase	100	100.00	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja Utama Inspektorat adalah 95.18 (Baik) dengan rincian IKU yang capaiannya di atas 100% adalah IKU 6 (100,00%) dan IKU.8 (102.83%). IKU yang capaiannya 100% yaitu IKU.2, IKU.4, IKU.5, IKU.9, IKU.10, dan IKU 13. Terdapat satu IKU dengan kategori cukup yaitu IKU.1. Sedangkan sisanya yaitu IKU.3, IKU.7, IKU.11, dan IKU.12 mendapatkan kategori “Baik” dengan rentang penilaian diantara 80-100%.

### 3.2. Analisis Kinerja

**Sasaran Strategis 1: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima.**

#### IKU.1. Level Maturitas SPIP

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Level Maturitas SPIP	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	75%	75%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu mendorong tingkat ketercapaian tujuan, menciptakan



budaya pengawasan, dan mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Ruang lingkup evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada BKN pada Tahun 2024, yang meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi aspek:
  - a. Tahap persiapan, yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas;
  - b. Tahap pelaksanaan, yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK;
  - c. Tahap pelaporan, yang meliputi penentuan area of improvement (AoI), pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat Asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: [PE.09.03/SP-199/D2/05/2024](#) tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2024, diperoleh hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada BKN tahun 2024 berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,520”. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

**Tabel. 6**  
**Hasil Evaluasi SPIP BKN Tahun 2024**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	1.600
2	Struktur dan Proses	30%	0.915
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	30%	1.005
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3.520
	- MRI		3.425
	- IEPK		3.320

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluator BPKP, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,351 dan pada tahun 2024 berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,520. Sehingga berdasarkan skor yang diperoleh terdapat kenaikan nilai SPIP dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 0,169. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.1 tahun 2024 yaitu 75% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 4 namun realisasi kinerja yang diperoleh berada level 3.

Dalam menindaklanjuti AoI dari hasil penilaian tahun 2023 serta sebagai upaya mencapai target yang ditetapkan, Tim SPIP BKN telah melaksanakan:

1. Rapat koordinasi antara Inspektorat sebagai Tim Penjamin Kualitas dengan Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai Tim Penilai Mandiri;
2. Berkoordinasi dengan satker dalam pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung yang diperlukan dalam penilaian;
3. Kegiatan FGD Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Profil Risiko Tahun 2023 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara secara daring

- pada tanggal 14-22 Mei 2024 dihadiri oleh perwakilan unit pemilik risiko di Lingkungan JPT Pratama, JPT Madya serta Entitas BKN;
4. Kegiatan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 3 Juli 2024;
  5. *Benchmarking* ke Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan pada 26 September 2024.

**Gambar 2.**  
**Kegiatan Benchmarking tim SPIP BKN ke Inspektorat Jenderal  
Kementerian Keuangan**



Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Level Maturitas SPIP tahun 2024 diantaranya yaitu:

1. Dikarenakan Server Pusat Data Nasional mengalami eror pada pertengahan bulan Juni 2024 sehingga berdampak juga pada eror aplikasi e-integrity tidak dapat diakses maka pengisian kertas kerja yang seharusnya diisi ke dalam aplikasi dialihkan menjadi ke kertas kerja manual dalam spreadsheet;
2. Pelaksanaan penilaian mandiri satker masih belum berjalan efektif;
3. BKN belum menerapkan *three lines of defence* dengan tepat yaitu pada lini kedua belum berjalan dengan optimal. Misalnya, belum terdapat Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan

kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko;

4. Dalam penyusunan profil risiko, risiko strategis organisasi dan risiko korupsi belum diidentifikasi. Dimana kondisi saat ini seluruh Unit Pemilik Risiko dalam menyusun identifikasi risiko masih terfokus pada risiko operasional.

Rekomendasi dan perbaikan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja antara lain:

1. Percepatan pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung beserta penyampaian surat permohonan evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN kepada Tim Evaluator BPKP sesuai batas waktu yang ditetapkan;
2. Mengoptimalkan satker untuk melaksanakan penilaian mandiri dengan menyelenggarakan bimbingan teknis yang direncanakan pada tahun 2025;
3. Perlu dibentuk Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko.
4. Perlu dilakukan perubahan pedoman manajemen risiko dalam menguraikan kategori risiko korupsi serta menambahkan proses penerapan manajemen risiko berupa komunikasi dan konsultasi.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.1	4	3	75%	4.389.000	4.389.000	-33%

Berdasarkan tabel di atas, IKU 1 memperoleh tingkat efisiensi -33% yang disebabkan oleh capaian kinerja yang kurang optimal dan realisasi kinerja yang belum tercapai meskipun

realisasi anggaran sama besar dengan pagu anggaran yaitu Rp4.389.000

## IKU.2. Level Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%

Dalam upaya mempertahankan ataupun meningkatkan level kapabilitas APIP, perlu terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan surat dari BPKP Nomor: [PE.09.03/LHP-195/D205/2/2023](#) tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara diperoleh kesimpulan hasil evaluasi bahwa Kapabilitas Inspektorat BKN pada tahun 2023 maupun 2024 telah berada pada **“Level 3”** dengan skor **“3,44”** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP dikarenakan tim kapabilitas APIP tidak memperoleh jadwal evaluasi oleh tim evaluator BPKP di tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.2 tahun 2024 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 3 dan realisasi kinerja yang diperoleh berada pada level 3.

Adapun hal yang telah dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPKP terkait monitoring dan evaluasi Area of Improvement (AoI). Pada

aspek program penjaminan dan peningkatan kualitas yang menjadi poin perbaikan evaluasi yakni menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala atas pedoman yang telah digunakan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan seperti penyusunan Pedoman Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus/Investigasi, atau melakukan evaluasi perbaikan pedoman pemberian jasa konsultansi dan lain sebagainya;

2. Pada tanggal 26 September 2024 telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer serta Risiko dan Pengendalian Teknologi Informasi dengan narasumber 1 Auditor dan dihadiri 34 Auditor Inspektorat BKN;
3. Telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern dan disahkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara. Adapun Piagam Pengawasan Intern dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Badan Kepegawaian Negara untuk mengevaluasi kegiatan APIP;
4. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan TSI di tahun 2025;
5. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer serta Risiko dan Pengendalian Teknologi Informasi dengan narasumber 1 Auditor dan dihadiri 34 Auditor Inspektorat BKN;

**Gambar 3.**

***Kegiatan PKS terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer serta Risiko dan Pengendalian Teknologi***





6. Menyusun draf pedoman audit investigasi, disertai dengan melaksanakan FGD Penyusunan Draft Pedoman Audit Investigasi secara luring pada tanggal 11 Desember 2024 dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri oleh seluruh Auditor Inspektorat.

**Gambar 4.**

***Kegiatan FGD Penyusunan Draft Pedoman Audit Investigasi***



Hambatan yang ditemui diantaranya yaitu:

1. Tim kapabilitas APIP tidak memperoleh jadwal evaluasi oleh tim evaluator BPKP di tahun 2024;
2. Belum dilakukan koordinasi secara efektif dengan BPKP terhadap pemenuhan eviden Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 2024.

Sehingga upaya perbaikan yang dilakukan yakni:

1. Melakukan koordinasi lebih efektif dengan BPKP terkait penyesuaian jadwal evaluasi;
2. Melakukan pembaharuan data yang disesuaikan dengan peraturan/kebijakan terbaru, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.2	3	3	100%	4.678.000	4.678.000	0%

Berdasarkan tabel di atas, IKU.2 diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan realisasi kinerja berhasil pada level 3 sesuai dengan target kinerja serta realisasi anggaran sama dengan pagu anggaran yaitu sebesar Rp4.678.000.

**Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama.**

**IKU.3. Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan**

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	85	85	88	88.5	94	83,75	87,75	86,53	88,14	87,07	92,63%	92,63%

Sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;



5. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat;
6. Mengetahui tingkat kepuasan pegawai BKN terhadap kualitas layanan yang diberikan Inspektorat, baik yang dirasakan oleh unit kerja di Kantor Pusat maupun satuan kerja Kantor Regional BKN;
7. Sebagai umpan balik bagi seluruh unit kerja BKN terhadap kinerja layanan yang diberikan;
8. Sebagai masukan bagi pegawai di lingkungan Inspektorat dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan;
9. Sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di Inspektorat.

Pada Triwulan IV tahun 2024 telah diterbitkan dan disampaikan ke seluruh satuan kerja Nota Dinas nomor: 227/PR.06.01/ND/H/2024 tentang Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Inspektorat periode Semester II Tahun 2024, pada Nota Dinas berisi tautan survei ditujukan untuk diisi oleh pengguna jasa Inspektorat yakni auditee di seluruh satuan kerja Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester I Tahun 2024 disampaikan bahwa survei diisi 136 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,47, Nilai Interval Konversi 86,76, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik). Adapun pada [Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester II Tahun 2024](#) disampaikan bahwa survei diisi 175 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,48, Nilai Interval Konversi 87,07, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik).

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan dari 9 unsur.

Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Berdasarkan hasil pengolahan data dari responden survei diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel. 7**  
**Nilai rata-rata Sub Unsur Tahun 2024**

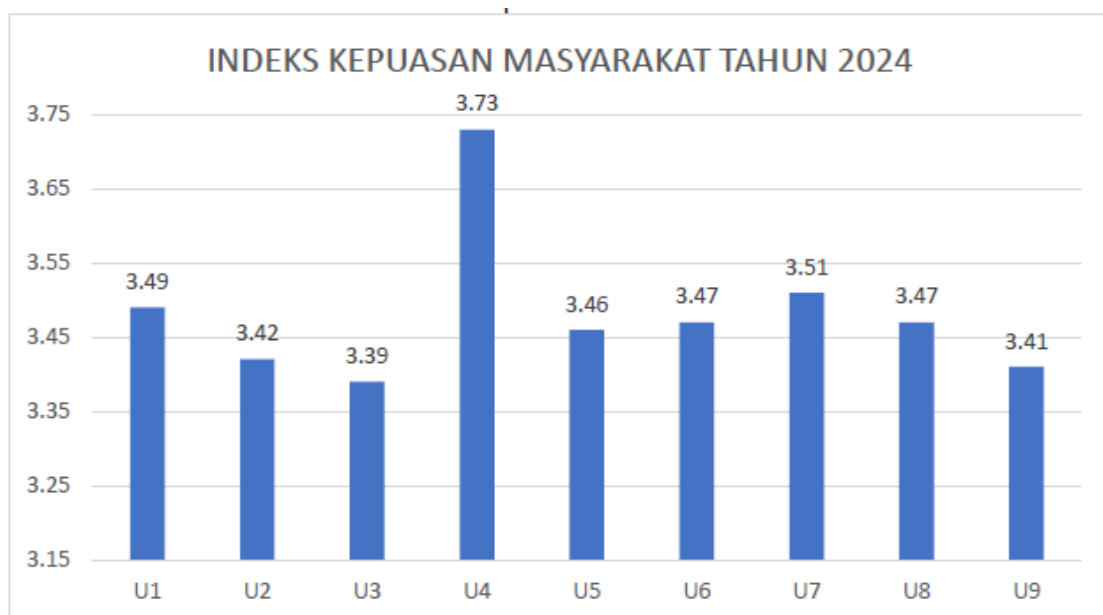
Unsur	No.	Pernyataan	NILAI
Persyaratan	1.	Dokumen kelengkapan yang diminta Auditor mudah dipahami	3,38
	2.	Pegawai Inspektorat bebas dari kepentingan pribadi dan golongan	3,56
	3.	Pegawai Inspektorat tidak menyalahgunakan wewenang	3,54
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Isi Laporan Hasil Audit/Reviu bermanfaat bagi Satker/Unit kerja dan mudah dipahami	3,45
	2.	Isi Laporan Hasil Audit/Reviu sesuai dengan fakta dilapangan	3,43
	3.	Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di Inspektorat mudah dimengerti dan dipahami	3,37
Waktu Penyelesaian	1.	Pelayanan yang diberikan Inspektorat Tepat Waktu	3,40
	2.	Laporan Hasil Audit/Reviu disampaikan Tepat Waktu	3,39
Biaya Tarif	1.	Pelayanan yang diberikan Inspektorat Gratis	3,75
	2.	Pegawai Inspektorat dalam memberikan pelayanan kepada Satker/Unit Kerja tidak mengharapkan imbalan berupa Uang, Barang dan Fasilitas	3,71
Produk Spesifikasi	1.	Layanan yang diberikan oleh Inspektorat telah sesuai dengan kebutuhan Satker/Unit Kerja	3,49
Jenis Layanan	2.	Inspektorat telah memberikan Layanan konsultasi yang optimal terkait permasalahan yang dihadapi satker/unit kerja	3,45

Unsur	No.	Pernyataan	NILAI
	3.	Inspektorat bekerjasama dengan baik dalam melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi	3,46
	4.	Inspektorat telah memberikan pendampingan yang optimal dalam penyusunan profil risiko unit	3,44
Kompetensi Pelaksana	1.	Pegawai Inspektorat memiliki kemampuan bekerjasama dengan baik	3,43
	2.	Pegawai Inspektorat telah memiliki Kompetensi Teknis yang Memadai	3,42
	3.	Pegawai Inspektorat telah bekerja dengan menunjukkan Integritas yang Tinggi	3,55
Perilaku Pelaksana	1.	Berkomunikasi dengan lancar saat memberikan pelayanan	3,49
	2.	Ramah dan santun dalam memberikan pelayanan	3,50
	3.	Berpenampilan rapi dalam memberikan pelayanan	3,52
	4.	Pegawai Inspektorat tidak memberikan perlakuan khusus pada orang tertentu	3,52
	5.	Inspektorat telah melakukan kampanye/Himbauan anti korupsi dan Gratifikasi	3,52
	6.	Pegawai Inspektorat yang berurusan dengan Satker/Unit Kerja telah melaksanakan tugas dengan baik	3,50
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Inspektorat menerima keluhan/Permasalahan dengan baik	3,47
	2.	Inspektorat telah menindaklanjuti dengan cepat dan tepat keluhan/permasalahan yang diajukan Satker/Unit Kerja	3,45
	3.	Inspektorat memberikan saran/rekomendasi/asistensi yang tepat dan dapat diaplikasikan	3,44
	4.	Inspektorat telah memberikan layanan yang dapat meningkatkan/memperbaiki kinerja dari Satker/Unit Kerja	3,47
	5.	Inspektorat telah memproses segala Bentuk Pelanggaran yang dilakukan PegawaiBKN sesuai ketentuan yang berlaku	3,47

Unsur	No.	Pernyataan	NILAI
	6.	Inspektorat telah memberikan perlindungan (menjaga kerahasiaan pelapor) terhadap laporan pengaduan	3,49
	7.	Inspektorat telah menindaklanjuti Laporan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.	3,46
Sarana dan Prasarana	1.	Inspektorat telah memiliki tata cara dan pedoman menerima laporan pengaduan	3,46
	2.	Inspektorat telah menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan oleh Satker/Unit Kerja	3,36

Berdasarkan grafik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat diketahui bahwa nilai terkecil berada di unsur 3 dengan skor 3,39 yaitu “Waktu Penyelesaian”. Hal ini menjadi catatan bagi Inspektorat agar Pelayanan yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sementara nilai tertinggi ada pada unsur 4 dengan skor 3,73, yaitu “Biaya Tarif”. Hal ini menjadi poin positif yang harus dipertahankan bahwa Pelayanan yang diberikan Inspektorat gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

**Grafik.2**  
**Nilai Unsur 1 s.d. 9**  
**IKM Inspektorat Tahun 2024**



Dibandingkan hasil survei Tahun 2023 dengan nilai 88,14 dan hasil survei Tahun 2024 dengan nilai 87,07 dimana mengalami penurunan sebesar 1,07 poin. Adapun capaian kinerja IKU.3 tahun 2024 yaitu 92,63% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada nilai 94 namun realisasi kinerja yang diperoleh adalah 87,07.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan terlihat dari nilai terkecil pada unsur survei dengan skor 3,39 yaitu “Waktu Penyelesaian”. Waktu penyelesaian berkenaan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan layanan Inspektorat adalah meningkatkan pelayanan yang diberikan Inspektorat agar lebih tepat waktu serta mensosialisasikan kembali kepada seluruh unit kerja terkait SOP yang ada di lingkungan Inspektorat agar mudah dimengerti dan dipahami seluruh pengguna layanan Inspektorat.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.3	94	87,07	92,63%	0	0	0%

Berdasarkan tabel di atas, IKU.3 diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan tidak memiliki pagu anggaran maupun realisasi anggaran dalam melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja 92.63%.

**Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel**

**IKU.4. Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN**

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	100%	100%

Selama tahun 2024 capaian yang telah dilakukan yaitu [penyusunan draf pedoman Audit Investigasi](#) dimana sesuai dengan formula pada manual IKU Inspektorat Tahun 2024 yaitu 1 (satu) draf pedoman Audit Investigasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.4 tahun 2024 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah 1 draf pedoman dengan realisasi telah menyelesaikan 1 draf pedoman.

Pedoman audit investigatif ini dibuat dengan maksud memberikan panduan bagi segenap Auditor Inspektorat Badan Kepegawaian Negara dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan keinvestigasian serta agar memiliki persepsi yang sama dalam penugasan audit investigatif. Pedoman Audit Investigatif ini bertujuan:

1. Mewujudkan output investigatif yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan nilai tambah (*value added*), kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengambil keputusan dan penetapan

kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus, dan/atau perkara.

Dalam proses menyusun draf pedoman audit investigasi selain melakukan diskusi di dalam internal tim juga telah dilakukan *Focus Group Discussion* Penyusunan Draft Pedoman Audit Investigasi secara daring pada tanggal 6 Desember 2024 dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri oleh seluruh Auditor Inspektorat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan draf pedoman Audit Investigasi yaitu menyesuaikan isi pedoman dengan kebijakan yang ada, sehingga tindak lanjut yang akan dikerjakan yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut pada periode semester I Tahun 2025.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.4	1	1	100%	0	0	0%

Berdasarkan tabel di atas, IKU.4 diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan tidak memiliki pagu anggaran maupun realisasi anggaran dalam melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja 100%.

#### **IKU.5. Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti**

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2024, jumlah pengaduan melalui WBS maupun pengaduan langsung (termasuk e-LAPOR) yang masuk ke Inspektorat BKN sebanyak 109 (seratus sembilan) pengaduan, Data tersebut diperoleh dari Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS yang disampaikan oleh Tim WBS periode bulan Januari sampai dengan November 2024 sedangkan pelaporan periode Desember 2024 akan diterbitkan pada bulan Januari 2025 hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Dari total 109 (seratus sembilan) pengaduan tersebut sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) sudah selesai diproses dan sisa 10 (sepuluh) pengaduan masih proses ditindaklanjuti oleh tim WBS dengan rincian sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) pengaduan melalui WBS dan sebanyak 12 (dua belas) pengaduan langsung termasuk melalui e-LAPOR. Sehingga persentase penyelesaian pengaduan tahun 2024 berdasarkan formula manual IKU yaitu  $(109/109) \times 100\% = 100\%$ . Diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

**Formula :**

$$(N / A) \times 100\%$$

Ket:

N : Jumlah laporan pengaduan eksternal dan internal yang ditindak lanjuti.

A : Jumlah laporan pengaduan eksternal dan internal yang diterima.

Adapun rincian pengaduan eksternal/internal yang telah ditindaklanjuti dapat dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini:



**Tabel. 8**  
**Data Pengaduan kepada Inspektorat bulan Januari-November 2024**  
**Melalui WBS**

No	Satuan Kerja	Pengaduan yang Masuk			Tindak Lanjut Pelaporan Pengaduan			
		Tanpa Identitas	Dengan Identitas	Jumlah	Belum diproses	Sedang diproses	Data tidak lengkap	Selesai Tindaklanjuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pusat	13	78	91	0	3	0	88
2	Kanreg I BKN Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
3	Kanreg II BKN Surabaya	0	0	0	0	0	0	0
4	Kanreg III BKN Bandung	0	0	0	0	0	0	0
5	Kanreg IV BKN Makassar	1	2	3	0	0	0	3
6	Kanreg V BKN DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0
7	Kanreg VI BKN Medan	0	0	0	0	0	0	0
8	Kanreg VII BKN Palembang	0	0	0	0	0	0	0
9	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0
10	Kanreg IX BKN Jayapura	0	2	2	0	2	0	0
11	Kanreg X BKN Denpasar	0	0	0	0	0	0	0
12	Kanreg XI BKN Manado	0	0	0	0	0	0	0
13	Kanreg XII BKN Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0
14	Kanreg XIII BKN Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0
15	Kanreg XIV BKN Manokwari	0	0	0	0	0	0	0
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	0	4	4	0	4	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>88</b>

Jumlah pengaduan melalui aplikasi WBS sebanyak 97 pengaduan, berasal dari:

- Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara sebanyak 91 pengaduan masuk, dengan status 88 selesai ditindaklanjuti, 1 pengaduan yang masuk di bulan Maret dan 2 pengaduan

yang masuk di bulan November sedang dalam proses tindaklanjut;

- Kantor Regional IX BKN Jayapura sebanyak 2 pengaduan masuk di bulan Oktober sedang dalam proses tindaklanjut;
- Pusat Pengembangan ASN sebanyak 4 pengaduan masuk di bulan November sedang dalam proses tindaklanjut.

**Tabel. 9**  
**Data Pengaduan Langsung kepada Inspektorat bulan Januari-November 2024**

No	Satuan Kerja	Pengaduan yang Masuk			Tindak Lanjut Pelaporan Pengaduan			
		Tanpa Identitas	Dengan Identitas	TOTAL	Belum diproses	Sedang Diproses	Data Tidak Lengkap	Selesai Tindaklanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pusat	4	8	12	0	1	0	11
2	Kanreg I BKN Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
3	Kanreg II BKN Surabaya	0	0	0	0	0	0	0
4	Kanreg III BKN Bandung	0	0	0	0	0	0	0
5	Kanreg IV BKN Makassar	0	0	0	0	0	0	0
6	Kanreg V BKN DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0
7	Kanreg VI BKN Medan	0	0	0	0	0	0	0
8	Kanreg VII BKN Palembang	0	0	0	0	0	0	0
9	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0
10	Kanreg IX BKN Jayapura	0	0	0	0	0	0	0
11	Kanreg X BKN Denpasar	0	0	0	0	0	0	0
12	Kanreg XI BKN Manado	0	0	0	0	0	0	0
13	Kanreg XII BKN Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0
14	Kanreg XIII BKN Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0
15	Kanreg XIV BKN Manokwari	0	0	0	0	0	0	0
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4	8	12	0	1	0	11

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengaduan langsung sebanyak 12 pengaduan masuk berasal dari Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara yaitu 11 pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti dan 1 pengaduan yang masuk di bulan Oktober sedang dalam proses tindak lanjut.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat satker yang menyampaikan laporan wbs tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan pada setiap periode pengumpulan laporan. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan yaitu berkoordinasi dan mengingatkan secara berkala penanggung jawab yang menyampaikan laporan wbs setiap satker.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.5	100%	100%	100%	0	0	0%

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh tingkat efisiensi 0% dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan pada IKU.5 tidak memiliki pagu anggaran maupun realisasi anggaran dengan capaian kinerja 100%.

#### **IKU.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan**

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%

Pada tahun 2024, Inspektorat menyusun kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan berdasarkan [Program Kerja Pengawasan Tahunan \(PKPT\) Tahun 2024](#). Inspektorat merencanakan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan dengan rincian 5 (lima) kegiatan pre audit, 11 (sebelas) kegiatan audit, 10 (sepuluh) kegiatan Reviu, 21 (dua puluh satu) kegiatan evaluasi, serta 21 (dua puluh satu) kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dimana saat ini ada sebanyak 36 Auditor dari total kebutuhan 90 Auditor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 54 Auditor berdasarkan penetapan peta jabatan pada Keputusan Kepala Nomor 150.1 tahun 2022, Inspektorat berhasil mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 10**  
**Data Kegiatan Pengawasan Inspektorat tahun 2024**

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Kegiatan yang Direncanakan Berdasarkan PKPT</b>	<b>Kegiatan yang Telah Dilaksanakan</b>
AUDIT	Pre Audit Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	Pre Audit Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024
	Pre Audit Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	Pre Audit Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024
	Pre Audit Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	Pre Audit Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024
	Pre Audit Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	Pre Audit Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024
	Pre Audit Kanreg Manokwari periode Januari	Pre Audit Kanreg Manokwari periode Januari

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Kegiatan yang Direncanakan Berdasarkan PKPT</b>	<b>Kegiatan yang Telah Dilaksanakan</b>
	s.d September 2024	s.d September 2024
	Audit kinerja	Audit kinerja
	Audit operasional Dit Inti periode Jan- Sept TA 2024	Audit operasional Dit Inti periode Jan- Sept TA 2024
	Audit Operasional Pengadaan dan KP periode Jan- sept TA 2024	Audit Operasional Pengadaan dan KP periode Jan- sept TA 2024
	Audit Operasional Biro Humas periode Jan- Sept 2024	Audit Operasional Biro Humas periode Jan- Sept 2024
	Audit Operasional Dir Kompensasi periode Jan- Sept 2024	Audit Operasional Dir Kompensasi periode Jan- Sept 2024
	Audit Operasional Dir. Wasdal 3 periode Jan- Sept 2024	Audit Operasional Dir. Wasdal 3 periode Jan- Sept 2024
	Audit Operasional Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	Audit Operasional Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024
	Audit Operasional Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	Audit Operasional Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024
	Audit Operasional Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	Audit Operasional Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024
	Audit Operasional Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	Audit Buril Kanreg Manado periode Januari s.d Agustus 2024

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Kegiatan yang Direncanakan Berdasarkan PKPT</b>	<b>Kegiatan yang Telah Dilaksanakan</b>
	Audit Operasional Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024	Audit Operasional Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024
REVIU	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2023	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2023
	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2023	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2023
	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2023	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2023
	Reviu LK semester I	Reviu LK semester I
	Reviu RKA KL TA 2025	Reviu RKA KL TA 2025
	Reviu LK TWIII TA 2024	Reviu LK TWIII TA 2024
	Reviu RKBMN TA 2026	Reviu RKBMN TA 2026
	Reviu PAPBJ	Reviu PAPBJ
	Revisi POK Tahun 2024	Revisi POK Tahun 2024
	Revisi RKBMN Tahun 2024	Revisi RKBMN Tahun 2024
EVALUASI	Evaluasi AKIP Kanreg Manado, Kanreg Surabaya, Kanreg Aceh, Kedeputian Sinka	Evaluasi AKIP Kanreg Manado, Kanreg Surabaya, Kanreg Aceh, Kedeputian Sinka
	Evaluasi AKIP Kanreg Manokwari, Kanreg Pekanbaru, Kanreg Palembang, dan Kedeputian Mutasi	Evaluasi AKIP Kanreg Manokwari, Kanreg Pekanbaru, Kanreg Palembang, dan Kedeputian Mutasi

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Kegiatan yang Direncanakan Berdasarkan PKPT</b>	<b>Kegiatan yang Telah Dilaksanakan</b>
	Evaluasi AKIP Kanreg Jayapura, Kanreg Makassar, Kanreg Banjarmasin dan Sestama	Evaluasi AKIP Kanreg Jayapura, Kanreg Makassar, Kanreg Banjarmasin dan Sestama
	Evaluasi AKIP Kanreg Bandung, Kanreg Jakarta, Kanreg Denpasar, Kedeputan PMK dan Inspektorat	Evaluasi AKIP Kanreg Bandung, Kanreg Jakarta, Kanreg Denpasar, Kedeputan PMK dan Inspektorat
	Evaluasi AKIP Kanreg Medan, Pusbang ASN, Kanreg Yogyakarta dan Kedeputan wasdal	Evaluasi AKIP Kanreg Medan, Pusbang ASN, Kanreg Yogyakarta dan Kedeputan wasdal
PENGAWASAN LAINNYA	Penilaian Mandiri RB	Penilaian Mandiri RB
	Penilaian Mandiri ZI	Penilaian Mandiri ZI
	SPIP	SPIP
	MRI	MRI
	Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP
	RB Inspektorat	RB Inspektorat
	Penyusunan draf Pedoman Audit Investigasi	Penyusunan draf Pedoman Audit Investigasi
	LHKASN	LHKASN
	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)
	Benturan Kepentingan	Benturan Kepentingan
	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2024	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2024
	WBS dan admin disiplin	WBS dan admin disiplin

Jenis Kegiatan	Kegiatan yang Direncanakan Berdasarkan PKPT	Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
	Gratifikasi (UPG)	Gratifikasi (UPG)
	Tim UPR Inspektorat	Tim UPR Inspektorat
	Tim P3DN	Tim P3DN
	Tim Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat	Tim Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat
	SPI KPK	SPI KPK
	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN

Berdasarkan tabel di atas, dari 67 kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan yang direncanakan pada PKPT 2024 Inspektorat telah melaksanakan 68 kegiatan dengan 1 tambahan di luar PKPT 2024 yaitu Audit Operasional Kantor Regional XII BKN Banda Aceh periode Januari - Juni 2024. Sepanjang tahun 2024 Inspektorat juga melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan disiplin pegawai. Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pada tahun 2024 sesuai formula pada manual IKU yaitu  $(68/67) \times 100\% = 101\%$ . Maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 101% dari target 100%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.6	100%	101%	101%	666.648.000	664.498.583	1.31%

Berdasarkan tabel di atas, berhasil diperoleh tingkat efisiensi 1.31% dengan pagu anggaran Rp666.648.000,- dan



realisasi anggaran Rp664.498.583 mampu memperoleh capaian kinerja 101%.

**IKU.7. Persentase Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan**

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	92.11%	92.11%	92.11%

Berdasarkan amanat Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya pelaksanaan pemantauan Sistem Pengendalian Intern harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Serta berkenaan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang sesuai di dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER01/AAIPI/DPN/2021 bahwa Pimpinan APIP harus memastikan dan memantau Auditan telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif.

Pada Tahun 2024 telah disampaikan [Nota Dinas Nomor: 006/AI.06/ND/H/2025](#) tanggal 7 Januari 2025 hal Penyampaian Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK s.d. Semester II TA 2024 dan [Nota Dinas Nomor: 015/AI.01/ND/H/2025](#) tanggal 9 Januari 2025 hal Penyampaian Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi Inspektorat s.d Semester II Tahun 2024 kepada unit kerja terkait. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Auditi menghadapi keterbatasan personil yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut yang efektif. Sehingga upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat adalah dengan membentuk tim pembinaan dan pendampingan pengelolaan anggaran dan kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dimana Auditi dapat berkonsultasi kendala yang dihadapi terkait pengelolaan anggaran dan kinerja dengan tim pembinaan dan pendampingan masing-masing sesuai yang tertera dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor 7.1 Tahun 2024.

Berikut rincian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Tahun 2020-2024 BKN berdasarkan ST Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel. 11**  
**Data Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun 2020-2024**

Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status		
		Sesuai	Belum Sesuai	Belum di TL
Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	5	4	1	0
Biro Keuangan	4	0	1	3
Biro Sumber Daya Manusia	8	8	0	0
Kanreg XIII BKN Banda Aceh	4	4	0	0
Dit. PPSI ASN	3	3	0	0
Pusat Penilaian Kompetensi ASN	3	3	0	0
Kantor Regional VI Medan	6	6	0	0
Kantor Regional II Surabaya	4	4	0	0
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	16	16	0	0
Kantor Regional IV BKN Makassar	20	19	0	1
Dit. Pengadaan dan Kepangkatan	7	3	3	1
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Sehingga diperoleh persentase capaian  $75/80 \times 100\% = 93.75\%$  untuk tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Adapun untuk Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun LHP 2022-2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 12**  
**Daftar Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun LHP 2022-2024**

No	Kedeputan/ Unit Kerja	Total Rekomen- dasi	Status				Persen- tase
			Sesuai	Pengajuan Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	
1	Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN	15	5	1	9	0	40%
2	Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara	1	0	0	1	0	0%
3	Kedeputan Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	2	1	0	0	1	50%
4	Biro Keuangan	7	4	2	1	0	86%
5	Biro Sumber Daya Manusia	2	1	0	1	0	50%
6	Biro Umum	12	7	1	2	2	67%
7	Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan	9	6	0	3	0	67%
8	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	8	6	2	0	0	100%
9	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	11	6	3	0	2	82%

No	Kedeputan/ Unit Kerja	Total Rekomen- dasi	Status				Persen- tase
			Sesuai	Pengajuan Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	14	8	4	1	1	86%
11	Inspektorat	7	6	1	0	0	100%
12	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5	1	1	1	2	40%
13	Kantor Regional II BKN Surabaya	7	1	2	2	2	43%
14	Kantor Regional III BKN Bandung	17	9	6	2	0	88%
15	Kantor Regional IV BKN Makassar	11	7	2	1	1	82%
16	Kantor Regional V BKN Jakarta	3	1	0	2	0	33%
17	Kantor Regional VI BKN Medan	7	6	1	0	0	100%
18	Kantor Regional VII BKN Palembang	1	0	1	0	0	100%
19	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2	0	2	0	0	100%
20	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1	0	0	0	1	0%
21	Kantor Regional X BKN Denpasar	4	0	3	1	0	75%
22	Kantor Regional XI BKN Manado	6	1	4	1	0	83%
23	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3	0	0	3	0	0%
24	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	6	3	3	0	0	100%

No	Kedeputan/ Unit Kerja	Total Rekomen- dasi	Status				Persen- tase
			Sesuai	Pengajuan Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	
25	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	7	1	1	1	4	29%
	Total	168	80	40	32	16	

Keterangan:

1. Kategori Status:

- Sesuai : Tindak lanjut telah dinilai sesuai oleh BPK.
- Pengajuan Sesuai : Hasil tindak lanjut sedang diajukan ke BPK dan proses dilakukan penilaian.
- Belum Sesuai : Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi yang diberikan.
- Belum Ditindaklanjuti : Belum terdapat tindak lanjut.

2. Persentase dihitung antara penjumlahan Kategori Status Sesuai dan Pengajuan Sesuai dibagi Total Rekomendasi.

3. Unit Kerja yang tidak ada dalam tabel di atas adalah Unit Kerja yang telah menindaklanjuti dengan status sesuai 100% atau tidak terdapat rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.

Dari tabel di atas diperoleh persentase capaian  $152/168 \times 100\% = 90.48\%$  untuk tindak lanjut rekomendasi BPK. Maka capaian kinerja IKU.7 adalah  $93.75\% + 90.48\%/2 = 92.11\%$ . Terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari 93% menjadi 92.11% dengan penurunan sebesar 0.89%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.7	100%	92.12%	92.11%	180.135.000	180.134.997	-8.55%

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi yang diperoleh berada pada persentase -8.55% dengan pagu anggaran Rp180.135.000,- dan realisasi anggaran Rp180.134.997 mampu memperoleh capaian kinerja 92.11%.

### 3.5. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya ASN di lingkup Sestama BKN yang Kompeten

#### IKU.8. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	80	80	81	81	81	n/a	79,81	73,86	74,75	83,29	102,83%	102,83%

Dalam rangka Pelaksanaan dan penerapan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya memberi Mandat untuk mewujudkan ASN/PNS yang Profesional dan RPJMN 2020 – 2024 serta Renstra Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 yang di dalamnya tertuang pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN pada Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesional ASN.

Berdasarkan [Surat Biro Sumber Daya Manusia Nomor: 3/B-KP.05.02/SD/A.II/2025](#) tanggal 9 Januari 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 atas Dasar Penilaian Tahun 2023, Inspektorat memperoleh nilai sebesar **83,29** melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 81. Dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 74,75 terdapat peningkatan nilai menjadi sebesar 83,29 (naik 8,54), dengan kenaikan yang signifikan tersebut IP ASN Inspektorat termasuk dalam kategori tinggi.

Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi yang meliputi

dimensi Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin 5%. Perolehan Indeks Profesional tersebut dikategorikan sebagai berikut :

1. Nilai IP 51 – 60 Kategori sangat rendah
2. Nilai IP 61 – 70 Kategori rendah
3. Nilai IP 71 – 80 Kategori sedang
4. Nilai IP 81 – 90 Kategori tinggi dan
5. Nilai IP 91 – 100 kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2024, sebagai upaya mencapai target Indeks Profesionalitas dan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat maka pegawai di lingkungan Inspektorat telah berperan aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sebanyak 19 (sembilan belas) baik yang diselenggarakan oleh internal BKN maupun dari eksternal BKN dengan jenis kegiatan sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel.13**  
**Daftar Pelatihan yang Diikuti pada Tahun 2024**

No	Nama Pelatihan	Peserta
1	<i>In House Training</i> Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-kasus Fraud	14 Auditor Inspektorat BKN
2	Diklat Fungsional Auditor Terampil	5 Auditor
3	Workshop Draf Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)	1 Inspektur dan 6 Auditor
4	Workshop Agen Perubahan dan Innovation Expo BKN Tahun 2024	2 Auditor
5	Sertifikasi Manajemen Risiko (CRMO)	1 Auditor
6	Diklat Certification of Government Accounting Associate (CGAA)	1 Auditor
7	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1 Tahun 2024	1 Auditor
8	Pelatihan Business Process Engineer (BPE)	1 Auditor, 1 Analis Kinerja

No	Nama Pelatihan	Peserta
9	Pelatihan Manajemen Risiko SPBE	1 Auditor
10	Diklat Fungsional Auditor Madya	1 Auditor
11	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kebijakan Keamanan SPBE	1 Auditor
12	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Data Scientist Practitioner	1 Auditor
13	Diklat Fungsional Auditor Pertama	1 Auditor
14	Pelatihan Cyber Security	1 Auditor
15	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Specialist (CGRS)	1 Auditor
16	Diklat Fungsional Auditor Muda	1 Auditor
17	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA)	1 Auditor
18	Pelatihan Tematik Anti Korupsi Pelatihan Tematik Anti Korupsi	1 Kepala Subbagian Tata Usaha, 3 Auditor
19	Diklat Probity Audit	20 Auditor

**Gambar. 5**  
**Kegiatan IHT Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-kasus Fraud**



Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU.8 dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan pagu anggaran sebesar Rp91.443.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp91.442.500, efisiensi sumber daya berhasil dicapai pada nilai 2.75%.



Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.8	81	83.29	102,83%	91.443.000	91.442.500	2.75%

### 3.6 Sasaran Strategis 5 : Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses

#### IKU. 9. Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKN berencana untuk melakukan kegiatan pemutakhiran kebijakan dan pengembangan aplikasi SPBE yang difokuskan pada layanan internal, yang dapat meningkatkan nilai evaluasi SPBE. Sehingga tercapai tujuan dalam menyelenggarakan manajemen ASN dan pelayanan publik yang berkualitas.

Inspektorat sebagai unit pengguna layanan digital di lingkungan BKN menggunakan sejumlah aplikasi dan sistem informasi yang ada di BKN sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Adapun aplikasi yang digunakan di lingkungan Inspektorat antara lain:

1. Aplikasi e-Lapor yang digunakan masyarakat untuk melaporkan atau pengaduan yang ditujukan kepada Inspektorat.

2. Whistle Blowing System merupakan sarana pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Whistle Blowing System, Inspektorat dapat melakukan Monitoring dan tindak lanjut pengaduan tersebut.
3. Aplikasi Internal yang disediakan BKN dan dipergunakan oleh Inspektorat antara lain
  - a. Aplikasi LBP;
  - b. Aplikasi PRESENSI;
  - c. Aplikasi E-KINERJA;
  - d. Aplikasi SIPEPI;
  - e. Aplikasi SPEKTRA;
  - f. Aplikasi DS;
  - g. Aplikasi SIONI;
  - h. Aplikasi SIMONBAJA;
  - i. Aplikasi E-TRAVEL;
  - j. Aplikasi SRIKANDI.
4. Aplikasi Pengelolaan Tata Usaha Inspektorat menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan persuratan dan Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi kegiatan.

Pada tahun 2024, Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat sudah dimanfaatkan secara optimal sehingga memenuhi target capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100%. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi telah dibuat [Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat tahun 2004.](#)

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.9	100%	100%	100%	0	0	0%

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi yang diperoleh IKU.9 berada pada persentase 0% dikarenakan tidak terdapat pagu

anggaran maupun realisasi anggaran dalam memperoleh capaian kinerja 100%.

### 3.7. Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya birokrasi BKN di Lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

#### IKU.10. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Pelaksanaan Rencana Reformasi Birokrasi Inspektorat Aksi	36	36	36	36	100%	36	33,64	32,67	n/a	100%	100%	100%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2023 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Terbitnya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Berkenaan dengan tersebut, perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada seluruh unit kerja baik Eselon I maupun II di lingkungan BKN Pusat serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Adapun perubahan narasi semula "Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat" menjadi "Persentase Pelaksanaan

Rencana Aksi RB di lingkungan Inspektorat". Dikarenakan perubahan peraturan tersebut sehingga untuk nilai pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat tahun 2023 tidak dapat dimunculkan dan tidak dapat dibandingkan dengan persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Badan Kepegawaian Negara sudah tidak terbagi dalam tiap Kelompok Kerja. Oleh karena itu, untuk Tim Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan Tahun 2024 yang dikerjakan oleh Inspektorat tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun periode tersebut.

Adapun ruang lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kegiatan Utama yang disusun ke dalam 15 rencana aksi antara lain yaitu:

1) Tingkat Maturitas SPIP;

- Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SPIP
- Benchmarking dan Konsultasi ke Kementerian Keuangan
- FGD terkait evaluasi Profil Risiko Tahun 2023

2) Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI;

- Mengidentifikasi unit/ satuan kerja akan diajukan untuk penilaian WBK dan melakukan pendampingan terhadap unit/satuan yang akan diajukan untuk penilaian WBK
- Melakukan evaluasi terhadap unit/ satuan kerja yang telah mendapatkan WBK

- Penguatan Internalisasi Pelaksanaan RB, Zona Integritas, WBK, dan WBBM kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKN, baik BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN
  - Monitoring tindaklanjut atas rekomendasi LHE Zona Integritas yang diterbitkan Menpan.
- 3) Nilai SAKIP;
- Memastikan unit kerja memahami hasil evaluasi AKIP internal
  - Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di Unit Kerja.
- 4) Indeks SPBE;
- Menyampaikan permohonan penambahan pegawai yang berkualifikasi Teknologi Informasi untuk melaksanakan Audit TIK ke Biro SDM.
- 5) Survei Penilaian Integritas (SPI);
- Membuat video tentang Grtaifikasi yang berkolaborasi dengan BHHK
  - Sosialisasi tentang Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan BKN.
- 6) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan Audit Operasional
  - Memonitoring progress tindak lanjut rekomendasi dari LHP BPK dan LHA Inspektorat
- 7) Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- Melakukan monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan WBS

Pada Tahun 2024, tim Reformasi Birokrasi Inspektorat telah melaksanakan 15 kegiatan dari 15 kegiatan yang disusun pada dokumen Rencana Aksi. Sehingga target pada Tahun 2024 yaitu  $15/15 \times 100\% = 100\%$ . Maka capaian kinerja pada tahun 2024 untuk IKU 10 diperoleh 100%.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU.10 dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan pagu anggaran sebesar Rp53.267.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp53.074.234, efisiensi sumber daya dapat dicapai pada nilai 0.36%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.10	100%	100%	100%	53.267.000	53.074.234	0.36%

#### IKU.11. Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN	75	75	75	75	75	72,41	72,69	75,80	69,25	71,25	95%	95%

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Evaluasi SAKIP BKN yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat BKN Nomor [071/AI.03/LHE/H/2024](#) tanggal 26 Agustus 2024, memperoleh nilai sebesar **71.25** (tujuh puluh satu koma dua puluh lima) dengan kategori BB (Sangat Baik – Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator). Adapun dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel.14**  
**Komponen Penilaian Skor Akuntabilitas Kinerja**  
**Inspektorat Tahun 2024**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Skor Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	21,30
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,25
Skor Hasil Evaluasi			71,25
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN telah diterbitkan pada Triwulan III tahun 2024, dengan target skor 75 dan realisasi skor yang diperoleh 71.25, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 diperoleh  $71.25/75 \times 100\% = 95.00\%$ . Meskipun masih belum berhasil mencapai skor yang ditargetkan, terdapat kenaikan skor dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari skor 69,25 ke skor 71,25 (naik 2,00). Telah diterbitkan pula dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam penilaian skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN seperti Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020-2024, Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024, Manual IKU Inspektorat tahun 2024, Rencana Aksi Inspektorat tahun 2024, Laporan Kinerja Triwulan, maupun Laporan NPSS.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada IKU. 11 diantaranya yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja belum disusun sepenuhnya selaras, apabila terdapat perbedaan indikator kinerja (IKU) maupun target antara dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dengan Penetapan Kinerja (PK) belum disampaikan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) secara berkelanjutan selama periode Renstra;
2. Masih terdapat formulasi perhitungan IKU pada Manual IKU yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja baik rencana aksi maupun NPSS belum menjelaskan rekomendasi dan perbaikan secara selaras dengan permasalahan/kendala yang dihadapi pada seluruh capaian Indikator Kinerja Utama;

Rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan oleh

Inspektorat diantaranya yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja agar disusun secara selaras, apabila terdapat perbedaan indikator kinerja (IKU) maupun target antara dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dengan Penetapan Kinerja (Perkin) untuk mencantumkan penjelasan penyebab adanya perubahan tersebut pada dokumen Rencana Kerja (Renja) secara berkelanjutan selama periode Renstra;
2. Melakukan reviu dokumen Manual IKU terkait fomulasi perhitungan IKU agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat diyakini akuntabilitasnya;
3. Dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja unit baik rencana aksi maupun NPSS agar membuat rekomendasi dan perbaikan selaras dengan permasalahan/kendala yang dihadapi pada seluruh capaian Indikator Kinerja Utama;

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU.11 dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan capaian kinerja 95% tidak terdapat pagu anggaran maupun realisasi anggaran sehingga efisiensi sumber daya berada pada nilai 0%.



Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.11	75	71.25	95%	0	0	0%

### 3.8 Sasaran Strategis 7 : Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

#### IKU.12. Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat	98%	98%	100%	100%	100%	92,47%	99,99%	99,93%	98,29%	99,92%	99,92%	99,92%

Berdasarkan [Petunjuk Operasional Kegiatan \(POK\) Inspektorat cetakan ke-9](#) tanggal 29 November 2024 bahwa pagu Inspektorat adalah sebesar Rp1.017.500.000 (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentase 99,92% sebesar Rp 1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) atau 0,08%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta transportasi lokal.

Dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 pada 98,29% terdapat peningkatan persentase realisasi anggaran tahun 2024 menjadi 99,92% (naik 1,63). Secara keseluruhan anggaran dapat

terserap dengan optimal karena kegiatan di unit kerja dimonitoring secara berkala dan apabila terdapat perubahan kegiatan pada tahun berjalan maka pengelola segera mengajukan revisi POK sehingga penyerapan bisa dimaksimalkan.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.12	100%	99,92%	99,92%	0	0	0%

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi yang diperoleh IKU.12 berada pada persentase 0% dikarenakan tidak terdapat pagu anggaran maupun realisasi anggaran dalam memperoleh capaian kinerja 99.92%.

#### **IKU.13. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat**

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tidak terdapat temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Demikian pula pada tahun 2024 tidak terdapat temuan Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat terhadap Inspektorat. Sehingga tidak terdapat tindak lanjut hasil audit pada Inspektorat yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Sehingga persentase tindak lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat pada tahun 2024 berdasarkan formula pada manual IKU yaitu  $(100/100) \times 100\% =$

100%. Diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU.9	100%	100%	100%	0	0	0%

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi yang diperoleh IKU.13 berada pada persentase 0% dikarenakan tidak terdapat pagu anggaran maupun realisasi anggaran dalam memperoleh capaian kinerja 100%.

### 3.3. Capaian Anggaran

Berdasarkan [Petunjuk Operasional Kegiatan \(POK\) Inspektorat cetakan ke-9](#) tanggal 29 November 2024 bahwa pagu Inspektorat adalah sebesar Rp1.017.500.000 (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentasi 99,92% sebesar Rp 1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) atau pada persentase 0.08%. Anggaran Inspektorat dialokasikan untuk belanja barang yang terdiri atas perjalanan dinas, jamuan rapat, honorarium narasumber/jasa profesi, dan jasa lainnya berupa pelatihan. Dalam proses pengelolaan anggaran, pengelola di Inspektorat senantiasa berkoordinasi dengan Inspektur dan auditor sehingga realisasi anggaran dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan program yang direncanakan. Berikut pagu dan realisasi anggaran Inspektorat tahun 2024:

**Tabel. 15**  
**Rencana dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2024**

<b>Program Kegiatan (Output dan Rincian Kegiatan)</b>	<b>Pagu Revisi</b>	<b>Realisasi Tahun 2024 (SP2D)</b>	<b>Persentase %</b>
Program Dukungan Manajemen	Rp1.017.500.000	Rp1.016.696514	99.92 %
Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp1.017.500.000	Rp1.016.696514	99.92 %
Layanan Reformasi Kinerja	Rp43.477.000	Rp43.284.234	99.56 %
a. Peningkatan Kualitas Kinerja melalui Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi	Rp43.477.000	Rp43.284.234	99.56 %
Layanan Audit Internal	Rp974.023.000	Rp973.412.280	99.94 %
a. <i>In House Training</i> Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal	Rp50.240.000	Rp50.240.000	100.00 %
b. Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat	Rp41.203.000	Rp41.202.500	100.00 %
c. Reviu Laporan Keuangan	Rp10.181.000	Rp10.180.000	99.99 %
d. Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	Rp1.540.000	Rp1.521.000	98.77 %
e. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	Rp635.051.000	Rp634.461.583	99.91 %
f. Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan	Rp180.135.000	Rp180.134.997	98.62 %
g. Penerapan Manajemen Risiko	Rp18.480.000	Rp18.479.200	100.00 %
h. Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Rp4.678.000	Rp4.678.000	100.00 %
i. Internalisasi Pengendalian Gratifikasi	Rp9.790.000	Rp9.790.000	100.00 %
j. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp4.389.000	Rp4.389.000	100.00 %
k. Sosialisasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Rp18.336.000	Rp18.336.000	100 %

## **BAB. IV PENUTUP**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran utama yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Inspektorat BKN ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di samping juga dapat dipergunakan sebagai alat pengendali manajemen yang handal untuk melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat BKN.

Laporan kinerja tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja baik bagi unit kerja di lingkungan BKN, maupun pembaca dan juga sebagai bahan untuk perbaikan pencapaian Kinerja pada tahun berikutnya di lingkup Inspektorat.

### **4.1. Kesimpulan**

Dengan berdasarkan pada uraian dan pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Kinerja Inspektorat BKN, maka pada garis besarnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam mencapai visi dan misinya Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan internal melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya terhadap kinerja dan anggaran di lingkungan BKN Pusat maupun Kantor Regional BKN serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN;
2. Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana

aksi maupun PKPT Tahun 2024 dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentasi 99,92% sebesar Rp1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam). Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta transportasi lokal;

3. Dalam pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara telah sesuai dengan kode etik dan standar Audit yang berdasarkan pada peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

#### **4.2. Rekomendasi/Masukan**

Dalam upaya mempertahankan maupun menyempurnakan kinerja yang telah dicapai sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2024, maka perlu untuk dilakukan peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan tugas pokok Inspektorat melalui peningkatan kompetensi baik berupa *workshop*, pelatihan, maupun pengiriman diklat bagi auditor. Selain itu senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagai upaya mencapai visi dan misi BKN.

## Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan 2024 cetakan kesembilan;
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024.



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Herdi  
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Haryomo Dwi Putranto  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2024

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian  
Negara

Haryomo Dwi Putranto  
NIP. 196509141992031001

Pihak Pertama  
Inspektur

Dedi Herdi  
NIP. 196511041992031001



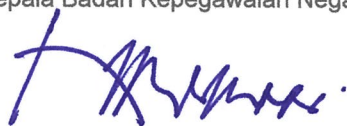
## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS.1	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	IKU.1	Level Maturitas SPIP	4
		IKU.2	Level Kapabilitas APIP (IA-CM)	3
SS.2	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama.	IKU.3	Indeks kepuasan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.	94
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS.3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel.	IKU.4	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan BKN.	1
		IKU.5	Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100
		IKU.6	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan.	100
		IKU.7	Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan terhadap kinerja dan keuangan.	100
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS.4	Terwujudnya ASN di lingkup Sestama BKN yang kompeten.	IKU.8	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	81
SS.5	Tersedianya sistem informasi ASN di lingkup Sestama BKN yang handal dan mudah diakses.	IKU.9	Persentase Pemanfaatan Sistem informasi yang Terstandar di Lingkup Inspektorat	100
SS.6	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Sestama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	IKU.10	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat	100
		IKU.11	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Inspektorat.	75
SS.7	Terkelolanya anggaran di lingkup Sestama BKN secara efisien dan akuntabel.	IKU.12	Persentase realisasi anggaran di Inspektorat	100
		IKU.13	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP /Inspektorat.	100

Kode/ KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi	
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp.	1.100.000.000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Rp	350.000.000
EBD.965	Layanan Audit Internal	Rp	750.000.000
TOTAL PAGU ALOKASI		Rp	1.100.000.000

Jakarta, 04 Januari 2024

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto  
NIP. 196509141992031001

Pihak Pertama  
Inspektur



Dedi Herdi  
NIP. 196511041992031001

POK INSPEKTORAT T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(088)  
(01)  
(017220)  
Rp. 1,017,500,000

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Badan Kepegawaian Negara  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen			1,017,500,000	
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			1,017,500,000	
3635.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	52.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,017,500,000	
-----					
3635.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2.0 Dokumen		43,477,000	
052	Pelaksanaan			43,477,000	U
A	Peningkatan Kualitas Kinerja melalui Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi			43,477,000	
521211	Belanja Bahan			2,440,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Biaya Snack Rapat Biasa [31 ORG x 1 KL]	31.0 OK	24,000	744,000	
	- Biaya Makan Rapat Biasa [32 ORG x 1 KL]	32.0 OK	53,000	1,696,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			38,850,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Perjalanan Dinas Pelaksanaan Reformasi Kinerja	1.0 PKT	38,850,000	38,850,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,187,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta) [7 ORG x 1 KL]	7.0 OH	191,000	1,337,000	SBM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [5 ORG x 1 KL]	5.0 OK	170,000	850,000	SBM
3635.EBD.965	Layanan Audit Internal	50.0 Dokumen		974,023,000	
051	Perencanaan dan Persiapan			91,443,000	U
A	In House Training Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal			50,240,000	
521211	Belanja Bahan			4,040,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 2 KEG]	40.0 OK	53,000	2,120,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [20 ORG x 4 KEG]	80.0 OK	24,000	1,920,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			46,200,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Biaya In House Training (IHT) [14 ORG x 1 KL]	14.0 OK	3,300,000	46,200,000	
B	Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat			41,203,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21,403,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan	1.0 PKT	21,403,000	21,403,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			19,800,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [20 ORG x 3 KL]	60.0 OK	170,000	10,200,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (D.K.I. Jakarta) [20 ORG x 3 KL]	60.0 OH	160,000	9,600,000	SBM
052	Pelaksanaan			882,580,000	U
B	Reviu Laporan Keuangan			10,181,000	

POK INSPEKTORAT T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara  
 UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA  
 ALOKASI Rp. 1,017,500,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III )			10,181,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Biasa [27 ORG x 4 KL]	108.0 OK	50,760	5,482,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [29 ORG x 7 KEG]	203.0 OK	23,150	4,699,000	
C	<i>Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara</i>			1,540,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III )			1,540,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KL]	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [20 ORG x 1 KL]	20.0 OK	24,000	480,000	
D	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan</i>			635,051,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III )			54,250,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Biasa [25 ORG x 26 KL]	650.0 OK	53,000	34,450,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [25 ORG x 33 KEG]	825.0 OK	24,000	19,800,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III )			568,586,000	RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan dan Pengawasan [1 PKT]	1.0 PKT	568,586,000	568,586,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III )			12,215,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota [3 ORG x 14 KL]	42.0 OK	170,000	7,140,000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 PKT]	1.0 PKT	5,075,000	5,075,000	
E	<i>Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan</i>			180,135,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III )			4,961,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Biasa [21 ORG x 3 KL]	63.0 OK	52,690	3,319,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [23 ORG x 3 KL]	69.0 OK	23,800	1,642,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III )			175,174,000	RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan dan Pembinaan [1 PKT]	1.0 PKT	175,174,000	175,174,000	
F	<i>Penerapan Manajemen Risiko</i>			18,480,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III )			18,480,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Biasa [30 ORG x 8 KEG]	240.0 OK	53,000	12,720,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [30 ORG x 8 KEG]	240.0 OK	24,000	5,760,000	
G	<i>Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)</i>			4,678,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III )			1,078,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Biasa [14 ORG x 1 KL]	14.0 OK	53,000	742,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [14 ORG x 1 KL]	14.0 OK	24,000	336,000	

POK INSPEKTORAT T.A. 2024

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(088)  
(01)  
(017220)  
Rp. 1,017,500,000

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Badan Kepegawaian Negara  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	Belanja Jasa Profesi			3,600,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [2 ORG x 2 JAM]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
H	Internalisasi Pengendalian Gratifikasi			9,790,000	RM
521211	Belanja Bahan			9,790,000	
	(KPPN.088-Jakarta III )				
I	- Biaya Makan Rapat Biasa [130 ORG x 1 KEG]	130.0 OK	52,310	6,800,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [130 ORG x 1 KEG]	130.0 OK	23,000	2,990,000	
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			4,389,000	
521211	Belanja Bahan			4,389,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
J	- Biaya Makan Rapat Biasa	57.0 OK	53,000	3,021,000	
	- Biaya Snack Rapat Biasa	57.0 OK	24,000	1,368,000	
	Sosialisasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			18,336,000	
521211	Belanja Bahan			12,936,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [132 ORG x 1 KEG]	132.0 OK	52,000	6,864,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [132 ORG x 2 KEG]	264.0 OK	23,000	6,072,000	SBM
					SBM
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III )				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [3 ORG x 2 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
2. P = Komponen Penunjang  
3. \* = Blokir

Usulan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan  
Tahun Audit 2024  
Inspektorat Badan Kepegawaian Negara

Sebelumnya							Setelah Perubahan						
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Jeni Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai					Mulai	Selesai			
1	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2023	Mandatory	8 January 2024	8 March 2024	Riyantie Novita Rina, Rahayu, Linda, Almira, Pandu, Margo, Akhmar, vivi, Jonathan , Zahwa	Dalnis Ketua Tim Anggota	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2023	Mandatory	8 January 2024	8 March 2024	Riyantie Novita Rina, Rahayu, Linda, Almira, Pandu, Margo, Akhmar, vivi, Jonathan , Zahwa	Dalnis Ketua Tim Anggota	
2	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2023	Mandatory	8 January 2024	8 March 2024	Dyah L Fita Arie P, Hoven, Melly, Syafria, Rei, Fathur, Biayu	Dalnis Ketua Tim Anggota	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2023	Mandatory	8 January 2024	8 March 2024	Dyah L Fita Arie P, Hoven, Melly, Syafria, Rei, Fathur, Biayu	Dalnis Ketua Tim Anggota	-
3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2023	Mandatory	8 January 2024	8 March 2024	Ari R Arniz Angga, Fitri, Citra, Irma, Esra dan Bayu	Dalnis Ketua Tim Anggota	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2023	Mandatory	8 January 2024	8 March 2024	Ari R Arniz Angga, Fitri, Citra, Irma, Esra dan Bayu	Dalnis Ketua Tim Anggota	-
4	Pre Audit Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	Sangat Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis Ketua Tim Anggota	Pre Audit Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	Sangat Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis Ketua Tim Anggota	-
5	Pre Audit Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Arniz Arie p Melly, esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	Pre Audit Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Arniz Arie p Melly, esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	-
6	Pre Audit Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	Pre Audit Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	-
7	Pre Audit Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	Pre Audit Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	-
8	Pre Audit Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	Pre Audit Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 March 2024	18 October 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	-
9	Evaluasi AKIP Kanreg Manado, Kanreg Surabaya, Kanreg Aceh, Kedeputan Sinka	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	Evaluasi AKIP Kanreg Manado, Kanreg Surabaya, Kanreg Aceh, Kedeputan Sinka	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	-

10	Evaluasi AKIP Kanreg Manokwari, Kanreg Pekanbaru, Kanreg Palembang, dan Kedeputan Mutasi	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	Evaluasi AKIP Kanreg Manokwari, Kanreg Pekanbaru, Kanreg Palembang, dan Kedeputan Mutasi	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	-
11	Evaluasi AKIP Kanreg Jayapura, Kanreg Makassar, Kanreg Banjarmasin dan Sestama	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	Evaluasi AKIP Kanreg Jayapura, Kanreg Makassar, Kanreg Banjarmasin dan Sestama	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	-
12	Evaluasi AKIP Kanreg Bandung, Kanreg Jakarta, Kanreg Denpasar, Kedeputan PMK dan Inspektorat	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota	Evaluasi AKIP Kanreg Bandung, Kanreg Jakarta, Kanreg Denpasar, Kedeputan PMK dan Inspektorat	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota	-
13	Evaluasi AKIP Kanreg Medan, Pusbang ASN, Kanreg Yogyakarta dan Kedeputan wasdal	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Arniz Arie P Melly, esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	Evaluasi AKIP Kanreg Medan, Pusbang ASN, Kanreg Yogyakarta dan Kedeputan wasdal	Mandatory	3 April 2024	31 May 2024	Arniz Arie P Melly, esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	-
14	Reviu LK semester I	Mandatory	1 July 2024	30 August 2024	Fita Novita Dyah L, Rina, Akhmar, Pandu, melly, hoven, jonathan, zahwa, fathur, bayu, rahayu,vivi,mira, margo,pipit, linda, syafria	Dalnis Ketua Anggota	Reviu LK semester I	Mandatory	1 July 2024	30 August 2024	Fita Novita Dyah L, Ari Rahma, Rina, Akhmar, Pandu, melly, hoven, jonathan, zahwa, fathur, bayu, rahayu,vivi,mira , margo, pipit, linda, syafria	Dalnis Ketua Anggota	Menambahkan personil anggota tim
15	Audit kinerja	Tinggi	1 July 2024	29 November 2024	Riyantie Arniz Angga, Esra, citra, biayu, arie P, irma, rey	Dalnis KT Anggota	Audit kinerja	Tinggi	1 July 2024	29 November 2024	Riyantie Arniz Angga, Esra, citra, biayu, arie P, irma, rey	Dalnis KT Anggota	-
16	Reviu RKA KL TA 2025	mandatory	29 May 2024	29 November 2024	Dyah hoven Fitri seluruh auditor	Dalnis KT 1 KT 2 AT	Reviu RKA KL TA 2025	mandatory	29 May 2024	29 November 2024	Dyah hoven Fitri seluruh auditor	Dalnis KT 1 KT 2 AT	-
17	Reviu LK TWIII TA 2024	mandatory	1 October 2024	29 November 2024	Fita Novita Rina, Akhmar, Pandu, Fathur, bayu, ayu, syafria, fitri	Dalnis KT Anggota	Reviu LK TWIII TA 2024	mandatory	1 October 2024	29 November 2024	Fita Novita Rina, Akhmar, Pandu, Fathur, bayu, ayu, syafria, fitri	Dalnis KT Anggota	-
18	Reviu RKBMN TA 2026	mandatory	1 October 2024	29 November 2024	Ari Rahma Melly Dyah , hoven, vivi, margo, mira,linda , jonathan, zahwa	Dalnis KT Anggota	Reviu RKBMN TA 2026	mandatory	1 October 2024	29 November 2024	Ari Rahma Melly Dyah , hoven, vivi, margo, mira,linda , jonathan, zahwa	Dalnis KT Anggota	-

19	Audit operasional Dit Inti periode Jan- Sept TA 2024	sangat tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	Audit operasional Dit Inti periode Jan-Sept TA 2024	sangat tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	-
20	Audit Operasional Pengadaan dan KP periode Jan-sept TA 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Pengadaan dan KP periode Jan-sept TA 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	-
21	Audit Operasional Biro Humas periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Biro Humas periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	-
22	Audit Operasional Dir Kompensasi periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Dir Kompensasi periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota	-
23	Audit Operasional Dir. Wasdal 3 periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Arniz Arie P Melly, Esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Dir. Wasdal 3 periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 October 2024	29 November 2024	Arniz Arie P Melly, Esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	-
24	Audit Operasional Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	sangat tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	sangat tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Fita R Fitri Margo, Citra, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota	-
25	Audit Operasional Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Arniz Arie p Melly, esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Arniz Arie p Melly, esra, Jonathan, Zahwa	Dalnis KT Anggota	-
26	Audit Operasional Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Ari Rahma Angga Rina, Rahayu, Almira, Fathur	Dalnis KT Anggota	-
27	Audit Operasional Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Dyah Hoven Syafria, vivi, Rey, Biayu	Dalnis KT Anggota	-
28	Audit Operasional Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	Audit Operasional Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024	Riyantie Novita Nurlinda, Akhmar, Irma	Dalnis KT Anggota	-
29	Penilaian Mandiri RB		January 2024	December 2024	Riyantie Arie P Rina Citra Rahayu almira Jonathan Bayu	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil	Penilaian Mandiri RB		January 2024	December 2024	Riyantie Arie P Rina Citra Rahayu almira Jonathan Bayu	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil	-



30	Penilaian Mandiri ZI		January 2024	December 2024	Angga Fitri Melly Syafria Margo	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia	Penilaian Mandiri ZI		January 2024	December 2024	Angga Fitri Melly Syafria MArgo	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia	-
31	SPIP		January 2024	December 2024	Dyah L Vivi Syafria Akhmar Reynaldi Biayu BUdi Friska	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU	SPIP		January 2024	December 2024	Dyah L Vivi Syafria Akhmar Reynaldi Biayu BUdi Friska	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU	-
32	MRI		January 2024	December 2024	Arniz Arie P Vivi Citra Rahayu Irma Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil	MRI		January 2024	December 2024	Arniz Arie P Vivi Citra Rahayu Irma Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil	-
33	Kapabilitas APIP		January 2024	December 2024	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil	Kapabilitas APIP		January 2024	December 2024	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil	-
34	RB inspektorat		January 2024	December 2024	Hoven Linda Biayu Budi Farhan	Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU	RB inspektorat		January 2024	December 2024	Hoven Linda Biayu Budi Farhan	Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU	-
35	RB pokja pengawasan		January 2024	December 2024	Arniz Dyah Hoven Zahwa	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Terampil	Penyusunan draft Pedoman Audit Investigasi		January 2024	December 2024	Arniz Dyah Hoven Angga Zahwa Fathur	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Terampi Auditor Terampil	1. Perubahan kebijakan atas evaluasi RB sudah tidak diperlukan per pokja. 2. Draft Pedoman Audit Investigasi merupakan capaian kinerja Inspektur yang eblum di cascadingkan ke bawah
36	LHKASN		January 2024	December 2024	Angga Pandu	Auditor muda Auditor Pertama	LHKASN		January 2024	December 2024	Angga Pandu	Auditor muda Auditor Pertama	-
37	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)		January 2024	December 2024	Riyantie Ari Rahayu Pandu Bayu	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)		January 2024	December 2024	Riyantie Ari Rahayu Pandu Bayu	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil	-
38	Reviu PAPBJ		January 2024	December 2024	Fita Esra Akhmar Irma Fathur Zahwa	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil	Reviu PAPBJ		January 2024	December 2024	Fita Esra Akhmar Irma Fathur Zahwa	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil	-
39	Benturan Kepentingan		January 2024	December 2024	Novita ARie P Friska	Auditor Madya AUditor Muda TU	Benturan Kepentingan		January 2024	December 2024	Novita ARie P Friska	Auditor Madya AUditor Muda TU	-
40	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2024		January 2024	December 2024	Dyah Fita Novita Fitri Vivi Linda Esra MArgo Pandu Irma	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Penyelia Auditor Pertama Auditor Pertama	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2024		January 2024	December 2024	Dyah Fita Novita Fitri Vivi Linda Esra MArgo Pandu Irma	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Penyelia Auditor Pertama Auditor Pertama	-

41	WBS dan admin disiplin		January 2024	December 2024	Fita Fitri Hoven Linda Fathur	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil	WBS dan admin disiplin		January 2024	December 2024	Fita Fitri Hoven Linda Fathur	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil	-
42	Gratifikasi (UPG)		January 2024	December 2024	arniz Syafria Citra	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir	Gratifikasi (UPG)		January 2024	December 2024	arniz Syafria Citra	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir	-
43	Tim UPR Inspektorat		January 2024	December 2024	Ari Rahma Melly Rina Margo Reynaldi Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU	Tim UPR Inspektorat		January 2024	December 2024	Ari Rahma Melly Rina Margo Reynaldi Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU	-
44	Tim P3DN		January 2024	December 2024	Riyantie Angga AKhmar Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Mahir Auditor Terampil	Tim P3DN		January 2024	December 2024	Riyantie Angga AKhmar Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Mahir Auditor Terampil	-
45	Tim Pemantauan Tindaklanjuti Rekomendasi Inspektorat		January 2024	December 2024	Almira Fathur	Auditor Pertama Auditor Terampil	Tim Pemantauan Tindaklanjuti Rekomendasi Inspektorat		January 2024	December 2024	Almira Fathur	Auditor Pertama Auditor Terampil	-
46	SPI KPK		January 2024	December 2024	Ari Rahma Melly Reynaldi Biayu	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil	SPI KPK		January 2024	December 2024	Ari Rahma Melly Reynaldi Biayu	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil	-
47	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		January 2024	December 2024	Riyantie Ari Rahma Arniz Syafria	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		January 2024	December 2024	Riyantie Ari Rahma Arniz Syafria	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama	-
48	Revisi POK Tahun 2024		January 2024	December 2024	Tim RKA KL sebelumnya		Revisi POK Tahun 2024		January 2024	December 2024	Tim RKA KL sebelumnya		-
49	Revisi RKBMN Tahun 2024		January 2024	December 2024	Tim RKBMN sebelumnya		Revisi RKBMN Tahun 2024		January 2024	December 2024	Tim RKBMN sebelumnya		-

Jakarta, 25 Juni 2024

Mengetahui

Pit Kepala BKN

Inspektur

#

\$